**THE IMPLEMENTATION OF THE RESPONSIBILITY OF CRIMINAL
OFFENDERS WITHOUT LEGAL RIGHT TO DISTRIBUTE AND
TRANSMIT INFORMATION THAT HAS INSULTING
CONTENT OR INSULTS**

(Study Number Decision : 867/Pid.Sus/2018/PN.Tjk.)

Oleh:

Veby Margaretha Benni¹, M.Fiebrian Adie Nance², Ayang Widi Pratiwi³
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Email: vebybenni@ublstudent@ubl.ac.id; febrian.adie@ubl.ac.id;
ayang.widi@ubl.ac.id

ABSTRACT

In this rapidly growing era, it covers all aspects of human life including the internet and social media. Freedom of expression can now not only be expressed through oral or written but also can be poured out or delivered through social media that is currently available. The development of information technology on the one hand will make it easier for humans to carry out their activities, on the other hand can cause various problems that require serious handling.

The problem in this study is how the deliberate responsibility of criminal offenders without legal rights distributes and transmits information that has a content of insult or defamation and whether the causes of the perpetrator carry out criminal acts that have a content of insult or defamation based on decision number 867 / Pid. Sus / 2018 / PN.Tjk.

The research method used by the author in compiling this thesis is a normative and empirical juridical approach, using secondary and primary data obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative analysis.

The results of the study indicate that the criminal offender intentionally without legal rights distributes and transmits information that has a content of insult or defamation based on decision number 867 / Pid.Sus / 2018 / PN.Tjk is in accordance with Article 45A (3) Jo Article 27 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 concerning amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions, imposes imprisonment for the defendant for 2 (two) years 6 (six) months and a fine of 500,000,000 IDR (five hundred million rupiahs) substitute 6 (six) months and the causes of the offender carrying out criminal acts that have a content of insult or defamation based on the decision number 867 / Pid.Sus / 2018 / PN.Tjk is due to internal and external factors.

The suggestion in this study is that with a lot of criminal acts of humiliation through internet media, it has been proven that the lack of public knowledge about the danger or the consequences of these actions. So when they are held accountable they are not able to account for their actions. For this reason, the government must intensify socialization so that people are wise in their activities in electronic media.

Keywords: **Implementation, Accountability, Defamation**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam 60 (enam puluh) tahun terakhir ternyata lebih luas dan lebih cepat daripada perkembangan yang dicapai manusia. Teknologi pada satu sisi membawa kemajuan yang menjanjikan perbaikan umat manusia (pemanfaatannya sebagai tenaga, dan energi), tetapi di sisi lain memungkinkan pemanfaatannya dapat memusnahkan peradaban hampir 5 (lima) kali lipat. Hampir semua negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor yang penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan negara.

Negara yang tidak memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan tertinggal dari peradaban. Di negara Indonesia pengembangan teknologi harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan akibat teknologi tersebut. Teknologi dan hasilnya sekarang tidak hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, tetapi sekaligus dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu.¹

Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Bahasa Indonesia pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah),

¹ Juwono Sudarsono. 1992. *Ilmu Teknologi dan Etika Berprofesi: Pandangan Sosial-Politi, Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. FISIP UI-Gramedia, Jakarta, hlm. 4

slander, libel, slander adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).²

Tindak pidana tersebut dapat dilakukan hanya dari depan komputer yang memiliki akses Internet tanpa takut diketahui oleh orang lain/saksi mata, sehingga kejahatan ini termasuk dalam *Transnational Crime* (kejahatan antar negara yang pengungkapannya sering melibatkan penegak hukum lebih dari satu negara). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kejahatan informasi teknologi/*Cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara.³

Kemajuan cara berpikir manusia dan perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak negatif tersebut, harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber (*cyber law*). Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang tindak pidana umum. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.

²Wawan Tunggal Alam.

2012. *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*. wartapena, Jakarta, hlm. 7

Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi (kehormatan) ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan.⁴

Seperti kasus yang menjerat terdakwa dengan Agung Ngesti Wibowo bin Agus Marwoto sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:867/Pid.SUS/2018/Pn.Tjk menyatakan terdakwa Agung Ngesti Wibowo Bin Agus Marwoto bersalah melakukan tindak pidana dengan menulis status yang bertuliskan postingan I” POLRI di Indonesia

adalah kumpulan orang-orang yang tidak bias bekerja, bubarkan POLRI ganti dengan badan-badan yang lebih bermanfaat bagi Negara ini, Polri bodoh semua orangnya, maaf yak lo anda sebagai bahan ketawaan selama ini itu karena anda kumpulan orang bodoh bubarkan Polri” kemudian terdakwa kembali menulis status yang bertuliskan postingan II” Hai Polisi apakah pekerjaanmu, pemerias, pemeraksa ataukah perampok hak asasi manusia, hai Polisi apakah kamu punya otak kalau lagi bekerja, bisanya kok main culik saja apakah kamu tidak takut kena marah sama bapak presiden, Hai Polisi, kamu adalah pelanggar hak asasi manusia sejati ataukah kamu kumpulan orang-orang yang tidak bias bekerja” selanjutnya terdakwa memposting ” Photo Kapolri dibuat dengan tulisan sebagai berikut “ JENDERAL OTAK HANSIP “ yang kemudian terdakwa kirim ke akun Instagram milik terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Samsung J5 warna putih yang merupakan miliknya, dengan ini melanggar Pasal 45A (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Agung Ngesti Wibowo Bin Agus Marwoto selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Barang bukti berupa 2 (dua) *capture* foto yang di *upload* oleh terdakwa, 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) buah akun media sosial instagram atas nama agung_n85 yang digunakan oleh terdakwa.

Menurut Bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang) Sedangkan, menurut frase bahasa inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*(fitnah), *slander, libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).⁵

Terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila

perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan (hukum tertulis).⁶

Sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang

⁵Wawan Tunggal Alam. *Loc.Cit.* hlm. 7

⁶<https://achmadnosiutama.blogspot.com/2016/02/makna-tanpa-hak-atau-melawan-hukum.html>, diakses tanggal 27 September 2018, pukul 15.22 Wib

tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.⁷

Sifat melawan hukum yang formil, alasan pembeda hanya dapat bersumber pada hukum positif yang tertulis. Namun, menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, alasan pembeda dapat bersumber dari luar hukum yang tertulis.

Kesimpulan dari sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana, maka itu merupakan tanda bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dapat hilang dengan adanya alasan pembeda.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Melawan Hukum Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor : 867/Pid.Sus/2018/PN.Tjk.)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- | Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tanpa hak melawan hukum mendistribusikan dan mentransmisikan informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ?
- | Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah :

- a. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tanpa hak melawan hukum mendistribusikan dan mentransmisikan informasi yang

⁷*Ibid*

memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

b. Penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tanpa hak melawan hukum mendistribusikan dan mentransmisikan informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoretis

Secara teoretis, kegunaan penelitian ini diharapkan akan memperkaya khasanah ilmu

hukum mengenai jenis tindak pidana pencemaran nama baik, dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun perbandingan bagi penelitian lanjutan.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik yang merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya (*cybercrime*).
- 2) Selain itu juga penelitian ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL).

D. Kerangka Konseptual

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁸

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Hal tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan ke pendidikan paksa maksudnya adalah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.⁹

Hezewinke Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah didalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan dalam hukum pidana menggunakan sarana-sarana yang

bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁰

Menurut Simons tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Menurut Vos Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-undang.¹²

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjokoro berupa 2 (dua) macam bentuk, yakni :¹³

a. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Dolus/Opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui (*wilens en wetens*) perbuatan yang dilakukan, terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.

⁸Wirjono Prodjodikoro.2003.*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

⁹Andi Hamzah, 2004.*Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 28

¹⁰ P.A.F. Lamintang. 1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181-182

¹¹ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 88

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2007.*Pokok-pokok Hukum Pidana*. PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.39

¹³erepo.unud.ac.id/10442/3/1e23c4cd-bd282d6dc081ec584f328355.pdf, diakses pada 10 November 2018, pukul 12.10 Wib

- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*)
Dapat diartikan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman; Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn*)
- 2) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang timbul tidak sengaja terjadi.

Menurut Laden Marpaung Tindak pidana dibedakan menjadi rubik-rubik, yaitu:¹⁴

- a. Tindak pidana ketertiban umum yang mencakup keamanan negara, martabat kepala negara, kepala-kepala negara sahabat, kewajiban dan hak kenegaraan, tata tertib dan keamanan umum;
- b. Tindak pidana terhadap kesusilaan;

¹⁴ Laden Marpaung. 1997. *Tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15-16

c. Tindak pidana terhadap orang yang mencakup kehormatan, rahasia, kemerdekaan pribadi, nyawa, badan dan harta. Tindak pidana terhadap orang, oleh sebagian pakar dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Tindak pidana penghinaan;
- 2) Tindak pidana tubuh dan nyawa;
- 3) Tindak pidana terhadap kekayaan;

Syarat-syarat pokok dari sebuah tindak pidana adalah:¹⁵

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dari rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedang syarat-syarat harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik.

S.R Sianturi, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁶

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggaran;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Menurut JE. Jonkers definisi tindak pidana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:¹⁷

- a. Kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain

¹⁵ P.A.F. Lamintang. *Op-Ci*. hlm.187

¹⁶ E.Y. Kater dan S.R. Sianturi. 1992. *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 211

¹⁷ *Ibid*. hlm. 192

kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.¹⁸

Di dalam Buku II KUHP terdapat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Sehingga dari rumusan pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana yaitu:¹⁹

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;.

Berdasarkan unsur di atas, unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk dalam unsur subjektif yaitu semua unsur yang melekat pada keadaan batin orangnya, sedangkan unsur selebihnya termasuk dalam unsur objektif yaitu semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.

Menurut doktrin lain, suatu tindak pidana dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁰

- a. Tindak pidana terhadap ketertiban umum yang mencakup keamanan negara, martabat kepala negara, tata tertib dan kekuasaan umum, penguasaan umum, peradilan keuangan, materai dan cap.
- b. Tindak pidana terhadap kesusilaan
- c. Tindak pidana terhadap orang yang mencakup kehormatan, rahasia, kemerdekaan nyawa, pribadi dan badan.

Pada macam-macam tindak pidana diatas pencemaran nama baik di

¹⁸Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart, Tangerang, hlm. 81

¹⁹Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82

²⁰Laden Marpaung. *Op.Cit.* hlm. 15

media internet termasuk tindak pidana kejahatan yang bersifat delik aduan tapi hanya mempergunakan elektronik sesuai dengan KUHP yang dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu mengenai kejahatan yang dimuat dalam buku II KUHP, karena kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis dan dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Kemudian untuk dapat dicela atas perbuatannya seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :²¹

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*Dolus/Opzet*) atau kealpaan (*Culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana, hal ini berkaitan dengan teori hukum pidana yang bersifat menghapuskan yaitu :²²

a. Alasan Pembenaar

Alasan pembenaar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

b. Alasan Pemaaf

Alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, artinya tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

c. Alasan penghapusan penuntutan

Artinya mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap dasar kemanfaatannya kepada masyarakat. Sebaiknya tidak diadakan penuntutan karena kepentingan umum, kalau perkaranya tidak dituntut yang

²¹Tri Andarisman, 2009, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 54

²²Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 5

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipidana.

Menurut Muladi, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif antara lain adalah :²³

- a. Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran prosedural dan keadilan substantif;
- b. Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunis, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik;
- c. Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan;
- d. Menjaga keselasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil;
- e. Integrasi antara aspirasi hukum dan politik;
- f. Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*.

²³Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 45

Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat :²⁴

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik.

Menurut, bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah), *slander*, *libel*, *slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).²⁵

Penghinaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mempermalukan orang lain, menjatuhkan orang lain

²⁴Roeslan Saleh. *Op.Cit.* hlm. 80
²⁵Wawan Tunggal Alam. *Op.Cit.* hlm. 7

atau berusaha mencemarkan nama baik seseorang. Berdasarkan perincian makna penghinaan tersebut, perlu dilakukan suatu penjabaran makna frasa penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri. Kondisibagaimana yang boleh dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik, dan unsur-unsur apa saja yang terkandung didalam sebuah penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat dikenai sanksi hukum.

Menghina ini juga tidak jelas dan sangat tergantung pada kebijakan hakim dalam pandangannya. Dua hakim dapat berbeda pendapat tentang apakah sebuah penghinaan sudah dilakukan atau belum. Menurut ahli bahasa, ada dua hal yang menentukan apakah sebuah kata/kalimat/tulisan menghina atau tidak, yaitu:²⁶

- a. Pilihan katanya, dan
- b. Intonasinya.

Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke Pengadilan Negeri dan jika memenangkan perkara bisa

mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (1).²⁷

Pasal 27 Ayat (3) ;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 Ayat (1) ;

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat

(1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

²⁶www.slideshare.net. Prokontra Pasal Penghinaan dalam UU ITE dan KUHP. diakses Tanggal 1 September 2018, pukul 22.47 Wib

²⁷Sutan Remy Syahdeini.2009.*Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 225

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.²⁸

Adapun alat-alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian karena sebagai dasar bagi hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, baik menyatakan terdakwa bersalah maupun menyatakan terdakwa tidak bersalah. Alat-alat bukti ini juga dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Alat bukti dalam pidana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami ini penelitian ini, maka penulis terbagi dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian dengan rinci sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah permasalahan dalam ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan tentang pengertian dan jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, faktor-faktor penyebab tindak pidana, penegakan hukum pidana, pengertian umum mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur

²⁸Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlang, Jakarta, hlm. 4

pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

Bab IV Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Melawan Hukum Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor : 867/Pid.Sus/2018/PN.Tjk), Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan yaitu Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tanpa hak melawan hukum mendistribusikan dan mentransmisikan informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Bab V Penutup, Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang berupa jawaban terhadap permasalahan dari penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif perbaikan dimasa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

| Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori, pandangan, konsep, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

| Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan sebagai objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara guna memperoleh gambaran dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan

(*Field Research*). Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*), mempelajari buku-buku, literatur-literatur serta Perundang-Undang, tulisan ilmiah, surat kabar serta internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan baku primer adalah bahan baku hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang terdiri dari literatur dan hasil karya ilmiah para sarjana. Data sekunder ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk melengkapi data primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, artikel-artikel, surat kabar maupun berasal dari media elektronik.

2. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Data primer diperoleh melalui penelitian di Lembaga Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Polresta Bandar Lampung.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk melengkapi data guna sebagai penguji penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library reseach*) dimaksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan Perundang-Undangan, serta bahan baku lainnya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan (*field research*) dimaksud untuk memperoleh arah

pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara :

1) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan (*observation*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan terhadap Putusan Nomor :867/Pid.Sus/2018/PN Tjk khususnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik *purposeive sampling*, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu narasumber yang akan diwawancarai sesuai dengan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan dapat berkembang saat penelitian.

Wawancara dilakukan kepada :

- a) Penyidik PolrestaTanjung Karang
= 1 orang

b) Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung

Karang = 1 orang

c) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung

karang = 1 orang + Jumlah 3 orang

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik dari hasil studi keputusan maupun studi lapangan, kemudian data tersebut diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing yaitu data diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. *Coding*

Yaitu mengklasifikasi jawaban para responden menurut jenisnya, kalsifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.

c. Sistematisasi Data

Yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi dengan tujuan agar terciptanya keteraturan dalam menjawab permasalahan.

D. Analisis Data

Setelah data terkumpul keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatukesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 45A (3) *Jo* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronikpertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak melawan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor putusan 867/Pid.Sus/2018/PN.Tjk dengan terdakwa Agung Ngesti Wibowo Bin Agus Marwoto terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agung Ngesti Wibowo Bin Agus Marwoto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 6(enam) bulan.

2. Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelakumaksudnya bahwa yang mempengaruhi

seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa), faktor pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu dan faktor pengendalian diri yang menjadi dasar hidup seseorang yang dimana kurangnya kesadaran diri orang itu bahwa menyebarkan kebencian yang dilakukan dengan sengaja dapat membuat kerusakan dan perpecahan disuatu wilayah atau Negara itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Peran keluarga dan lingkungan yang baik dalam pertumbuhan seseorang amatlah sangat penting, karna dari orang-orang sekitarnya faktor internal dan faktor eksternal seseorang itu terbentuk.
2. Pemerintah haruslah gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat bersikap bijaksana dalam beraktifitas dimedia elektronik. Kemudian untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan dengan menggunakan upaya preventif yaitu dengan melakukan tindakan yang bersifat pembinaan berupa pembelajaran dalam beraktifitas dimedia elektronik, pendidikan yaitu mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, pengarahan untuk orang yang tidak mengerti (orang awam dan anak-anak) bahaya dalam menggunakan media elektronik sangatlah penting agar mereka yang tidak mengerti akan tahu bahwa media elektronik sangatlah membahayakan jika mengerti dalam menggunakannya.
3. Dan juga pemerintah harus melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan penerapan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun sanksi disiplin, agar menimbulkan efek jera bagi mereka yang melanggar dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak sembarangan dalam menggunakan media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, cetakan kedua (edisi revisi), Jakarta, 2004,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil , *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- E.Y. Kater dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992
- Juwono Sudarsono, “*Ilmu Teknologi, dan Etika Berprofesi: Pandangan Sosial-Politik, Masyarakat, Jurnal Sosiologi*”, FISIP UI-Gramedia, Jakarta, 1992
- Laden Marpaung, *Tindak pidana terhadap kehormatan pengertian dan penerapannya*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 1997
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet 3, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Edisi Ketiga Cetakan Pertama, Bandung, 2003
- Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

C. SUMBER LAINNYA

<https://achmadnosiutama.blogspot.com/2016/02/makna-tanpa-hak-atau-melawan-hukum.html>, diakses tanggal 27 September 2018, pukul 15.22 Wib

www.slideshare.net, Pro kontra Pasal Penghinaan dalam UU ITE dan KUHP, diakses Tanggal 1 September 2018, pukul 22.47 Wib